

RAKOR DILKUMJAKPOL-PLUS DIY Aparat Penegak Hukum Tingkatkan Sinergitas



KR-Judiman

Penandatanganan MoU Optimalisasi Sinergitas Forum Dilkumjakpol DIY.

BANTUL (KR) - Meski pandemi Covid-19, penegak hukum dituntut untuk tetap produktif dan maksimal dalam melayani masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Banyak kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19, dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik, seperti pelaksanaan sidang, kunjungan dan pemberian asimilasi warga Binaan Pemasarakatan (WBP), mengurangi kepadatan tahanan dan lainnya, yang semua-

nya dapat menimbulkan permasalahan baru di internal Kemkumham maupun di lembaga lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Indro Purwoko, ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol) Plus Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Pemda DIY di Hotel Grand Dafan Rohan, Kamis (6/8).

Rakor kemarin menghadirkan narasumber Indro Purwoko, AKBP M Mar-

paung SH SSos MH (Polda DIY), Yohanes Priyadi SH MH (Kejati DIY), Haryanto SH MH (PT DIY), Koptol Ambar Songko SH (BNN DIY), dr Fitri Indah Setiyawati MSc (Dinkes DIY). Sebagai moderator Gusti Ayu Putu Suwardani Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham DIY sekaligus sebagai ketua panitia.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka optimalisasi sinergitas penyelenggaraan pengawasan, pencegahan, penindakan, Pembinaan Pelaksana Teknis Pemasarakatan DIY, yang saat ini juga melibatkan BNN dan TNI.

"Pelibatan instansi terkait diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi, sehingga penambahan fungsi 'plus' menjadi salah satu poin penting dalam forum ini," ungkap Indro Purwoko. (Jdm)-f

KPU Tetapkan Syarat Pendaftaran Paslon

BANTUL (KR) - Sebulan menjelang dibukanya pendaftaran pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, KPU Bantul menetapkan persyaratan untuk partai politik maupun gabungan partai politik yang ingin mengusung paslon pada Pilkada 2020.

Ketua Divisi Teknis KPU Bantul, Joko Santoso, Kamis (6/8), menuturkan sesuai Peraturan KPU No 3 Tahun 2017, KPU harus menetapkan persyaratan pencalonan bagi partai politik dan gabungan partai politik.

Pada 4 Agustus 2020 KPU Bantul telah menetapkan SK No 327 tentang persyaratan pencalonan tersebut. Ketentuan persyaratan pencalonan dikhususkan bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu 2019.

"Ketentuan jumlah kursi DPRD adalah paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, sehingga untuk mengusung calon sendiri minimal harus memiliki 9 kursi atau 25 persen

dari akumulasi jumlah perolehan suara sah pada Pemilu 2019 yakni sejumlah 149.479 suara sah," jelasnya.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019 di Bantul, ada 10 Parpol yang mendapatkan kursi yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat serta PBB.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, mengungkapkan dalam pencalonan ini masing-masing pasangan calon harus memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan yakni persyaratan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan syarat calon harus dipenuhi secara personal oleh calon bupati maupun calon wakil bupati.

Didik menegaskan syarat pencalonan harus sudah dikumpulkan dan memenuhi syarat saat pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 hingga 6 September 2020.

"Sedangkan untuk syarat calon yang dikumpulkan pada saat pendaftaran apabila ada yang perlu diperbaiki maka dapat dilakukan perbaikan syarat calon pada tanggal 14 hingga 16 September 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," urainya.

Sesuai PKPU No 6 Tahun 2020, maka untuk pendaftaran pasangan calon di KPU hanya dapat diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Partai pengusung serta pasangan calon yang bersangkutan.

"Untuk menginformasikan proses pendaftaran pasangan calon ini KPU dapat menyiarkan secara langsung melalui media informasi dan teknologi agar bisa disaksikan para pendukung dan masyarakat di kediaman masing-masing," tambahnya. (Aje)-f

MINA DOMPON SEJAHTERA KADISORO

Budidaya Lele Dongkrak Ekonomi Masyarakat

PANDAK (KR) - Pemerintah Desa Gilangharjo Pandak Bantul terus mendukung masyarakatnya untuk berdayaguna dengan potensi lingkungan masing-masing. Salah satunya dengan menghidupkan kembali program budidaya ikan memanfaatkan lahan tanah kas Desa Gilangharjo dan mengaktifkan kembali kelompok budidaya ikan Mina Dompok Sejahtera di Dusun Kadisoro Desa Gilangharjo.

Beranggotakan 12 kelompok mereka bangkit secara mandiri dan tidak tergantung pemerintah. "Tahun 2018 Pemerintah Desa Gilangharjo berusaha menghidupkan budidaya ikan fokus pembibitan sampai pembe-

serta ikan hias," ujar Lurah Desa Gilangharjo, Pardiyo, Rabu (5/8).

Sebelumnya DPPKP Bantul juga meluncurkan program pengembangan kawasan Sentra Budidaya Ikan Berbasis Kawasan di wilayah tersebut. Dalam acara itu dihadiri Kepala DPPKP

Bantul Yus Warseno, anggota Komisi D DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji SE, Camat Pandak Kusmardiono.

"Pemdes Gilangharjo telah membantu dalam bentuk peningkatan kapasitas kelompok terkait usaha budidaya ikan, termasuk memfasilitasi tanah kas desa untuk mem-

buat kolam. Desa juga mencoba menghubungkan dengan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan serta perguruan tinggi agar ada transfer ilmu pengetahuan," jelasnya.

Ketua Kelompok Budidaya Ikan Mina Dompok Sejahtera, Lin Sudarwan, mengungkapkan kelompoknya saat ini punya 88 petak kolam. Khusus petak kolam berisi ikan lele sebulan bisa panen 2 hingga 3 ton. Sistem budidaya secara bergilir, sehingga setiap minggu bisa panen.

Jika dibanding ikan lainnya, lele paling cepat panennya. Siklus budidaya lele bisa terjaga, mulai dari bibit hingga penjualan lele menggunakan satu pintu. (Roy)-f



KR-Sukro Riyadi

Kunjungan dari DPPKP dan DPRD Bantul di Kadisoro Pandak.

Produk Kerajinan Difasilitasi 'Marketplace'

BANTUL (KR) - Pemkab Bantul sangat memperhatikan pelaku usaha kecil yang terdampak Pandemi Covid-19, salah satunya dengan akan memfasilitasi tempat untuk kegiatan jual-beli atau marketplace baik secara online dan offline pada produk kerajinan pelaku UMKM. Usaha mereka seperti makanan kecil, minuman kemasan, aneka handycraft dan sebagainya.

"Dampak pandemi dirasakan seluruh warga utamanya pelaku usaha kecil. Maka kami berniat membuka pasar domestik berupa marketplace termasuk showroom untuk mereka memasarkan produk," jelas Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Pulung Haryadi, Kamis (6/8).

Untuk marketplace produk UKM dalam bentuk fisiknya (offline) rencananya pada kios-kios Pasar Seni Gabusan (PSG) Jalan Parangtritis.

"Sedangkan untuk marketplace dalam jaringan atau pasar daring akan dikomunikasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bantul selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola teknologi informasi (IT)," ujarnya.

Pulung mengungkapkan, terkait dengan kemudahan akses permodalan kepada pelaku UKM untuk pengembangan usaha, hal itu merupakan kewenangan perbankan. Sementara aturan Pemkab tidak berwenang mengatur perbankan terkait keringanan, penundaan cicilan dan sebagainya. (Aje)-f



Idham Samawi mengecek pembangunan ruko di Desa Bantul dari program PISEW.



Idham Samawi didampingi Joko Purnomo, Abdul Halim Muslih menjelaskan tentang program P3TGAI.

PROGRAM P3TGAI ASPIRASI IDHAM SAMAWI Puluhan Jaringan Irigasi di Bantul Diperbaiki

BANTUL (KR) - Pembangunan jaringan irigasi persawahan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berperan strategis meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Tahun 2020 ini sudah dibangun 26 jaringan irigasi persawahan dari 32 program yang direncanakan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dilaksanakan secara swakelola. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI Drs HM Idham Samawi.

Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap dengan adanya P3TGAI dari Kementerian PUPR ini dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain itu Idham berpesan pada petani agar tanah sebagai lahan pertanian tidak dijual meskipun berharga mahal.

Sebagai orang yang pernah menjabat Bupati selama 2 periode, Idham Samawi

tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Bantul. Salah satunya dengan melakukan perbaikan infrastruktur di sektor pertanian.

Lewat program P3TGAI Kementerian PUPR, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul. "Tidak mungkin Pemkab Bantul ingin menyejahterakan rakyat lewat anggaran dari APBD Bantul saja. Harus bersinergi dengan Pemda DIY dan Pemerintah Pusat," ujar Idham di sela pengecekan pembangunan jaringan irigasi persawahan di Dusun Babadan Bantul, Kamis (6/8).

Kunjungan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Bantul Drs H Abdul Halim Muslih, anggota DPRD Joko Purnomo, perwakilan BBWS Pramono ST Sp, Kabid SDA Dinas PU Bantul Yitno ST MT, Lurah Desa Bantul Supriyadi.

Rombongan juga mengunjungi GP3A Lestari-1 Dusun Dagan Timbulharjo Sewon Bantul. Serta program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

(PISEW) di Desa Bantul.

Sementara Ketua GP3A Desa Bantul Sudyono, mengungkapkan dengan dibangunnya jaringan irigasi persawahan tersebut mampu memperlancar proses pengairan di wilayahnya. "Kami sebagai petani tentu sangat merasakan manfaatnya terkait dengan pembangunan jaringan irigasi persawahan ini. Karena salah satu kunci untuk mendorong agar pertanian maju infrastruktur irigasi harus ditingkatkan kualitasnya. Lewat Pak Idham kami sudah dibantu semuanya," ungkapnya.

Sementara Ketua GP3A Mardiko Kanan Pendowoharjo Sewon Bantul Mardiyono, mengungkapkan melalui P3TGAI, daerah yang dibangun meliputi Miri, Bandung dan Jetis. "Kami sangat bersyukur lewat program Kementerian PUPR ini, petani di wilayah kami bisa merasakan manfaatnya. Oleh karena itu pihaknya berterima kasih dengan perjuangan Drs HM Idham Samawi dalam memperhatikan masyarakat kecil," tuturnya. (Tulisan dan Foto/Roy)-j



Idham Samawi berbincang dengan tokoh masyarakat Bantul, H Syaebani (kanan)



Idham Samawi, Abdul Halim Muslih, Joko Purnomo cek pembangunan jaringan irigasi persawahan di Dusun Dagan Sewon.



Perwakilan dari BBWS, Pramono (kanan) menjelaskan pembangunan jaringan irigasi persawahan.



Pengerjaan jaringan irigasi persawahan di Dusun Dagan Sewon Bantul.



Idham Samawi didampingi Abdul Halim Muslih, Joko Purnomo cek pembangunan jaringan irigasi di Pendowoharjo.